



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014*

**Peran UNDP Melalui Proyek *Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities (SPARC)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Penguatan Ketahanan Pangan dan Air Periode 2013 – 2016**

Skripsi

Oleh  
Melisa Setiawan  
2014330077

Bandung  
2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014*

**Peran UNDP Melalui Proyek *Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities (SPARC)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Penguatan Ketahanan Pangan dan Air Periode 2013 – 2016**

Skripsi

Oleh

Melisa Setiawan

2014330077

Pembimbing

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Melisa Setiawan  
Nomor Pokok : 2014330077  
Judul : Peran UNDP Melalui Proyek *Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities (SPARC)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Penguatan Ketahanan Pangan dan Air Periode 2013 – 2016

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 9 Januari 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang merangkap anggota**  
Sapta Dwikardana, Ph.D.

:

**Sekretaris merangkap pembimbing**  
Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D

:

**Anggota**  
Dr. Atom Ginting Munthe

:

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Melisa Setiawan

NPM : 2014330077

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Peran UNDP Melalui Proyek *Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities (SPARC)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Penguatan Ketahanan Pangan dan Air Periode 2013 – 2016

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Januari 2018

  
METERAI  
TEMPEL  
283F/AEF879754507  
5000  
RUPIAH  
Melisa Setiawan

## Abstrak

Nama : Melisa Setiawan  
NPM : 2014330077  
Judul : Peran UNDP Melalui Proyek *Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities* (SPARC) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Penguatan Ketahanan Pangan dan Air Periode 2013 – 2016

---

Provinsi NTT menghadapi masalah kemiskinan kronis, kerawanan pangan dan air, serta keterbatasan sumber mata pencaharian yang disebabkan oleh faktor geografis dan geofisika yaitu wilayah yang terpencil dan berbentuk kepulauan dengan variabilitas iklim alami yang tinggi, serta akibat adanya hambatan di level birokrasi pemerintah daerah provinsi dengan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Untuk mengatasinya, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi NTT membangun kerja sama dengan para lembaga internasional dan nasional, dan salah satunya adalah UNDP, untuk meluncurkan proyek bernama *Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Society in East Nusa Tenggara*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana Peran UNDP Melalui Proyek *Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities* (SPARC) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Periode 2013 - 2016?”**

Struktur landasan pemikiran yang komprehensif dalam penelitian ini akan dilandaskan melalui aplikasi beberapa teori dan konsep, yaitu Teori Pluralisme menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, Teori Organisasi Internasional menurut Clive Archer, Konsep Pembangunan menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Teori Kemiskinan menurut Paul Streeten, Konsep Pembangunan Masyarakat, Konsep Power menurut Joseph Nye, Konsep Ketahanan Pangan, serta Konsep Adaptasi terhadap Perubahan Iklim.

Pengimplementasian Proyek SPARC ditandai dengan terciptanya aktivitas-aktivitas yang mendorong adanya pembangunan masyarakat dan perbaikan kehidupan ekonomi di NTT dalam penguatan ketahanan terhadap pangan dan air melalui penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim yang bersifat berkelanjutan, baik sejak aspek perencanaan hingga aspek aktivitas operasional melalui jalinan kemitraan dengan para pemangku kepentingan di dalamnya.

Kata kunci: UNDP, Nusa Tenggara Timur, NTT, SPARC, peran, pembangunan, ekonomi, kemiskinan, perubahan iklim, ketahanan pangan, ketahanan air

## Abstract

*Name* : Melisa Setiawan  
*NPM* : 2014330077  
*Title* : *The Role of UNDP Through Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communitie (SPARC) Project in East Nusa Tenggara Province (NTT) in Strengthening Food and Water Resilience on 2013 - 2016*

---

*NTT Province faces the problem of chronic poverty, food and water vulnerability, and limited livelihood resources caused by geographic and geophysical factors namely isolated and archipelagic areas with high natural climate variability, as well as obstacles in the provincial government bureaucracy level also with the other external stakeholders. In order to resolve this, the Government of the Republic of Indonesia and the NTT Provincial Government established cooperation with international and national institutions, which one of them is UNDP, to launch a project called Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Society in East Nusa Tenggara. Based on these issues, the author formulated a research question “How is the Role of UNDP through the Project of Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities (SPARC) in East Nusa Tenggara Province (NTT) Year 2013 - 2016?”.*

*The comprehensive structure of the framework of thinking in this research will be based on the application of several theories and concepts, namely Pluralism Theory by Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, Theory of International Organization by Clive Archer, The Concept of Development by Michael P. Todaro and Stephen C. Smith , Theory of Poverty by Paul Streeten, The Concept of Community Development, The Concept of Power by Joseph Nye, The Concept of Food Security, and The Concept of Adaptation to Climate Change.*

*The implementation of the SPARC Project are characterized by the creation of activities that promote community development and improving the people’s economic life in NTT in strengthening food and water resilience through strengthening climate change resilience that are sustainable, starting from the planning aspect to the operational aspects with the established partnership with the stakeholders involved.*

*Keywords: UNDP, Nusa Tenggara Timur, NTT, SPARC, role, development, economy, poverty, climate change, food resilience, water resilience*

## **Kata Pengantar**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Bapa dan Juruselamat, Yesus Kristus, atas berkat dan perkenanan-Nya yang telah memampukan penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Peran UNDP Melalui Proyek *Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities* (SPARC) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Penguatan Ketahanan Pangan dan Air Periode 2013 – 2016.”

Adapun kegunaan dari penulisan laporan penelitian ini yaitu sebagai syarat kelulusan penulis dalam menempuh studi Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, dan lebih lanjut, penelitian inipun diharapkan bermanfaat dalam memberikan sumbangsih dalam pengembangan studi yang terkait dengan kajian ekonomi politik pembangunan, ekonomi politik sumber daya, serta peran organisasi internasional dalam hubungannya dengan negara. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk semakin menyempurnakannya.

Bandung, 9 Januari 2018

Penulis

*To the Creator, Father, and Savior: Jesus Christ—i am beyond grateful for Your love, mercy, grace, and favor that never fail to amaze me, shape and mold me to become who i am today, and to be the reason why even in pain i smile; in confusion i understand; in betrayal i trust; and in fear i continue to fight.*

*To my family: Papa, Mama, Ricky Abraham—i know for sure that God's plans to unify us as a family are far beyond than just a coincidence. For every single laughs and fights, also ups and downs in life, are the ones that teach me and give me a better understanding about how to love life and people sincerely, whatever the circumstances are. Thank you for working so hard in life, so that i can see the world in a wider and a deeper perspective through the education i earn.*

*To my lecturers double as supervisor and examiners:*

*Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D; Sapta Dwikardana, Ph.D; and Dr. Atom Ginting Munthe—thank you for the insights and the constructive criticisms so that this thesis can approach its eligibility.*

*To my Teman Kuliah: Maria Claudia, Olivia, Elizabeth Gunawan, Malvin Vilio—thank you for the companionships, the unbearable laughs and cries, the hearts of listeners and supporters. I love y'all and wish nothing but the brightest future ahead that already awaits!*

*To all members of HI UNPAR 2014: the lecturers and the fellow students—thank you for the knowledge, values, and moments shared.*

*To all members of Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (LKM UNPAR) 2015/2016 —thank you for the chance for me to learn and grow in a smart and critical think-tank community.*

*To all members of Cheers Up—thank you for being a family in God.*

*To all members of C92: Camilia Adianti, Sandriani Sinaga, Stefanie Puspa, Bibi Nung—thank you for being a good home, as we have shared place under the same roof throughout these uni years.*

*To all of the people who have come and gone in my life—thank you for the lessons learned. I do understand now the importance of loyalty, honesty, integrity, kindness, and how to appreciate human beings more than things; because this world is already a hard battlefield, and we just cannot live alone.*

## Daftar Isi

<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<i>Abstract .....</i>	<i>ii</i>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Grafik .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Singkatan .....</b>	<b>xii</b>
<b>Bab I: Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.2.1. Deskripsi Masalah .....	6
1.2.2. Pembatasan Masalah .....	10
1.2.3. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4. Kajian Literatur .....	11

1.5. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	29
1.6.1. Metode Penelitian.....	29
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data .....	30
1.7. Sistematika Pembahasan .....	31

## **Bab II: Permasalahan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara**

<b>Timur (NTT).....</b>	<b>33</b>
2.1. Gambaran Umum Masalah Pembangunan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) .....	34
2.1.1. Kemiskinan .....	34
2.1.2. Kerawanan Pangan dan Air .....	39
2.1.3. Keterbatasan Sumber Mata Pencaharian .....	48
2.2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Masalah Pembangunan Ekonomi di NTT .....	51
2.2.1. Kondisi Geografis dan Tantangan Perubahan Iklim .....	51
2.2.2. Hambatan di Level Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan Pemangku Kepentingan Eksternal Lainnya .....	55

## **Bab III: Profil United Nations Development Programme (UNDP) sebagai**

<b>Aktor Internasional yang Berkontribusi terhadap Pembangunan di Indonesia .....</b>	<b>61</b>
3.1. Gambaran Umum UNDP sebagai Organisasi Internasional .....	62
3.1.1. Tujuan, Visi, dan Misi UNDP .....	62

3.1.2. Struktur Organisasi UNDP .....	65
3.1.3. Sistem Kerja UNDP .....	68
3.1.4. Strategi Umum UNDP .....	74
3.2. UNDP di Indonesia .....	77
<b>Bab 4: Peran UNDP Melalui Proyek <i>Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities (SPARC)</i> di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dalam Penguatan Ketahanan Pangan, Air, dan Mata Pencaharian .....</b>	<b>81</b>
4.1. Latar Belakang Proyek SPARC di NTT .....	83
4.2. Proyek SPARC .....	86
4.2.1. Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Proyek SPARC .....	86
4.2.2. Strategi dan Pendekatan Proyek .....	91
4.2.3. Komponen Proyek .....	93
4.2.3.1. Pengembangan Kapasitas Lembaga di Level Provinsi dan Kabupaten dalam Mengintegrasikan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim melalui Pembangunan yang Berkelanjutan .....	93
4.2.3.2. Pemberdayaan dan Pendiversifikasian Mata Pencaharian dan Sumber Pendapatan Masyarakat Pedesaan yang Rentan terhadap Perubahan Iklim .....	99
4.2.4. Evaluasi Proyek .....	111
<b>Bab V: Kesimpulan .....</b>	<b>115</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>119</b>

## Daftar Grafik

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK NTT dan Nasional 2011-2014 .....	36
Grafik 2.2 PDRB Per Kapita ADHB NTT dan Nasional 2010-2014 .....	37
Grafik 2.3 Persentase Penduduk Miskin .....	38
Grafik 2.4 Persentase Rumah Tangga Kriteria Kelayakan Sanitasi dan Air Minum .....	48

## Daftar Tabel

Tabel 2.1 Perkembangan Penurunan Kemiskinan NTT 2008-2013 .....	42
Tabel 2.2 Jangkauan Pelayanan Air Bersih Untuk Rumah Tangga NTT 2008-2012 .....	46
Tabel 2.3 Lapangan Usaha Utama NTT 2008-2012 .....	50
Tabel 2.4 Nilai Tukar Petani NTT 2009-2012 .....	51

## Daftar Gambar

Gambar 3.1. Visi dan Keluaran Rencana Strategis UNDP .....	63
Gambar 3.2 Bagan Organisasi UNDP (2017) .....	68
Gambar 3.3 Siklus Program/Proyek UNDP.....	70
Gambar 3.4 Alur Kerja UN Country Programming Process .....	71

## Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AWP	: <i>Annual Work Plan</i>
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BMKG	: Badan Medeorologi Klimatologi dan Geofisika
BPMD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPTP	: Badan Pengkajian Teknologi Pertanian
CCA	: <i>Climate Change Adaptation</i>
CCA	: <i>Common Country Assessment</i>
CFS	: <i>Climate Field School</i>
CPAP	: <i>UNDP Country Programme Action Plan</i>
CPD	: <i>The UNDP Country Programme Document</i>

CPEIR	: <i>Climate Public Expenditure and Institutional Review</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FAO	: <i>The Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
FS	: <i>Field School</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
GEF	: <i>Global Environment Facility</i>
IGOs	: <i>International Governmental Organizations</i>
INGOs	: <i>International Non-Governmental Organizations</i>
IPB	: Institut Pertanian Bogor
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KEMAS PROKLIM	: Kelompok Masyarakat Program Kampung Iklim
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KPDT	: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
KPID	: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
NTP	: Nilai Tukar Petani
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PAC	: <i>Project Appraisal Committee</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
POSKO IKLIM	: Pusat Informasi tentang Risiko Iklim
RAN-GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SCCF	: <i>Special Climate Change Fund</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>

SPADU	: Sekretariat Bersama untuk Kemitraan Pembangunan NTT
SPARC	: <i>Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities</i>
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
UN	: <i>United Nations</i>
UNDAF	: <i>United Nations Development Assistance Framework</i>
UNDANA	: Universitas Cendana
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNDS	: <i>United Nations Development System</i>
UNPDF	: <i>United Nations Partnership For Development Framework</i>
WFP	: <i>World Food Program</i>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan secara cepat dan terus-menerus selalu terjadi di dalam seluruh dimensi kehidupan manusia beserta entitas-entitas lain yang berada disekitarnya, yang juga menyorot ke dalam perkembangan ilmu hubungan internasional dalam mengkaji isu-isu global yang juga mengalami perubahan dan perkembangan.

Hal tersebut membentuk terciptanya hubungan yang lebih luas dalam lingkup internasional yang menjadi kenyataan yang dialami oleh aktor-aktor internasional yang terlibat di dalamnya, dan entitas negara sebagai pemegang kekuasaan terbesar pun kini memiliki dinamika nya tersendiri untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor non – negara yang turut memberikan kontribusi di berbagai bidang dan isu yang semakin kompleks, seperti lembaga organisasi internasional, lembaga donor internasional, lembaga organisasi non-pemerintah, serta perusahaan multinasional.<sup>1</sup>

Tidak hanya dalam menghadapi kenyataan bahwa dunia tidak lagi semata terpusat pada isu-isu tradisional seperti upaya negara dalam meraih dan menggunakan *power*, atau bagaimana negara melakukan upaya pertahanan dan keamanan dalam menjaga stabilitas nasional maupun global, atau pula bagaimana

---

<sup>1</sup>Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press Inc., 2013), hlm. 68

negara berupaya memperkuat sendi-sendi ekonomi, tetapi kini muncul isu-isu baru atau menjadi bentuk turunan dalam skala yang lebih kecil tetapi begitu mempengaruhi hubungan internasional itu sendiri yang menjadi sorotan dan menjadi penting untuk dikaji seperti kemiskinan, kelaparan, penegakan hak asasi manusia, kesehatan, pemanasan global, perubahan iklim dan lingkungan hidup.

Secara khusus di bidang ekonomi, sebagai bidang yang menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu negara pun mengalami dimensi-dimensi yang patut untuk dikaji, yakni timbulnya masalah kemiskinan. Pada dasarnya, kemiskinan itu sendiri sebagaimana didefinisikan oleh World Bank merujuk kepada kondisi ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam memenuhi kesejahteraan mereka.<sup>2</sup> Degradasi pada kemampuan untuk menciptakan pendapatan di atas kebutuhan standar minimal atau dasar manusia yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan adalah cara yang paling umum digunakan dalam mengukur kemiskinan sebagai salah satu penyebab dari kemiskinan itu sendiri.<sup>3</sup> Selain itu, kemiskinan disebabkan karena adanya ketidakberdayan dari institusi-institusi negara dan masyarakat, diikuti dengan adanya kerentanan terhadap guncangan dan ketidakmampuan masyarakat di dalamnya untuk mengatasi guncangan tersebut. Kemiskinan menjadi masalah yang begitu penting karena menyangkut pada kesejahteraan serta kualitas hajat hidup manusia yang juga mempengaruhi aspek-aspek dalam kehidupan manusia yang saling terkait satu sama lainnya.

---

<sup>2</sup> World Bank, *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty* (USA: Oxford University Press, 2000), hlm. 34

<sup>3</sup> Nurani Chandrawati, "Menelaah Hubungan Timbal Balik antara Konflik Internal dengan Masalah Kemiskinan," *Jurnal Global* Vol. 8 No. 1, 2005, hlm. 39

Di sisi lain, masalah pemanasan global memicu terjadinya fenomena perubahan iklim dan cuaca yang ekstrem di seluruh belahan dunia, sejak terjadinya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi sebesar 0.8 derajat celsius dibandingkan sejak awal abad ke-20.<sup>4</sup> Peningkatan atau penurunan curah hujan yang mengakibatkan terjadinya banjir maupun justru kekeringan terjadi di hampir seluruh benua, termasuk Indonesia sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa yang cenderung memiliki iklim tropis. Yang patut menjadi perhatian adalah bahwa secara terus-menerus, terjadinya perubahan iklim tidak hanya semata berdampak pada peningkatan bencana alam saja, tetapi juga turut berdampak pada kondisi produktivitas lahan pertanian sebagai faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di suatu wilayah, ketersediaan air bersih yang bermanfaat bagi kebutuhan jasmani masyarakat dan kebutuhan irigasi, yang dimana kesemuanya itu menjadi dimensi yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan itu sendiri akibat rendahnya produktivitas keekonomian serta rendahnya ketahanan masyarakat terhadap kondisi kerentanan iklim di wilayah tersebut.

Adanya pembagian antara negara maju dengan negara berkembang dalam konstelasi perekonomian global yang ditentukan berdasarkan pendapatan per kapita setiap tahunnya menentukan bagaimana aktor-aktor dalam hubungan internasional baik negara maupun non-negara dalam meningkatkan pembangunan ekonomi untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan dan fenomena

---

<sup>4</sup> NASA, "Global Temperature," diakses melalui <http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php> pada 27 Februari 2017

perubahan iklim yang telah disebutkan sebelumnya. Mendesaknya permasalahan tersebut untuk segera diatasi terutama oleh negara-negara miskin dan berkembang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) sebagai organisasi internasional yang memiliki *power* dan legitimasi yang besar dalam mewadahi segenap kepentingan nasional negara-negara anggotanya pun merumuskan gagasan yang disebut *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dimulai sejak tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015 sebagai bentuk komitmen negara-negara dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan.<sup>5</sup> MDGs terdiri dari 8 poin, dimana beberapa diantaranya bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, memerangi perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan lingkungan, serta mengembangkan kemitraan global demi pembangunan.<sup>6</sup>

Kondisi kapabilitas pemerintah setiap negara yang berbeda-beda untuk menanggulangi permasalahan tersebut pun kemudian memicu kerja sama antar aktor yang turut berkontribusi di dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu pemerintah negara terkait dengan lembaga organisasi donor internasional.<sup>7</sup> Salah satu organisasi internasional yang secara praktis memegang peranan penting dalam mewujudkan MDGs adalah *United Nations Development Programme* (UNDP), sebagai organisasi yang vokal dan hadir dalam memberikan bantuan berupa materi dan non – materi terhadap negara penerima, terutama dalam

---

<sup>5</sup> United Nations, “Millenium Development Goals and Beyond 2015,” diakses melalui <http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml> pada 1 Maret 2017

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> OECD, *Better Aid: Improving Incentives in Donor Agencies, Good Practice and Self-Assesment Tool* (OECD Publishing, 2009), hlm. 12

konteks pembangunan manusia untuk mencapai penghidupan masyarakat yang lebih baik, termasuk di dalamnya pemberantasan kemiskinan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan kondisi pertumbuhan ekonomi tahunan nasional yang mampu bergerak diatas 5% pun dalam kenyataannya masih berada dalam bayang-bayang kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata di seluruh wilayah. Selain itu, kondisi geografis yang membuat kondisi vegetasi, komposisi dan struktur ekosistem yang berbeda di setiap wilayah yang juga rawan mengalami perubahan iklim yang ekstrem seperti kekeringan dengan indeks pembangunan manusia yang dibawah rata-rata terutama di wilayah pedesaan pun menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan ekonomi negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran UNDP dalam memperkuat ketahanan pangan, air dan mata pencaharian sebagai bentuk pembangunan di Provinsi NTT pada periode 2013 - 2016 melalui Proyek *Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities* (SPARC).

## 1.2 Identifikasi Masalah

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan nasional secara keseluruhan, dengan pertumbuhan yang solid 6 persen PDB setiap tahun sejak 2011 dan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional berkurang menjadi 11,36 persen pada tahun 2013 dari yang sebelumnya tercatat sebesar 15,1 persen pada tahun 1990.<sup>8</sup> Namun, beberapa permasalahan masih menjadi tantangan bagi wilayah-wilayah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa di Indonesia, seperti kesenjangan pembangunan dan produktivitas perekonomian yang tidak merata di setiap wilayah, serta ancaman bencana alam dan kondisi iklim ekstrem seperti kekeringan yang berkepanjangan.

Pada tahun 2015 dan 2016 NTT menempati peringkat ketiga provinsi termiskin di Indonesia dalam persentase jumlah penduduk miskin per provinsi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yakni mencapai 22,01 persen atau 1.150.080 orang dari sekitar 5,2 juta penduduk yang terdapat di provinsi ini, setelah provinsi Papua dan Papua Barat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> UNDP Indonesia, "COUNTRY BRIEF TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT FINANCING IN INDONESIA," diakses melalui [https://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/sites/default/files/documents/10\\_02\\_15/Country\\_Brief\\_Indonesia\\_FINAL\\_28102014.pdf](https://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/sites/default/files/documents/10_02_15/Country_Brief_Indonesia_FINAL_28102014.pdf) pada 3 Maret 2017

<sup>9</sup> "BPS: Provinsi NTT Peringkat Ketiga Termiskin di Indonesia," *POS KUPANG*, diakses melalui <http://kupang.tribunnews.com/2017/01/04/bps-provinsi-ntt-peringkat-ketiga-termiskin-di-indonesia> pada 3 Maret 2017

Secara geografis, NTT terletak di belahan timur Indonesia yang terdiri dari 550 pulau, dengan Flores, Sumba, dan Timor Barat sebagai pulau-pulau terbesar. Selama beberapa dekade, NTT menghadapi masalah kemiskinan kronis karena adanya ketergantungan terhadap situasi iklim yang harus kondusif demi memastikan kualitas yang baik dari hasil panen untuk tanaman pangan yang dihasilkan oleh para petani lokal. Dengan kondisi lokasi geografis yang terpencil, NTT harus berhadapan dengan masalah lambatnya pembangunan manusia dan ekonomi masyarakatnya, karena wilayah ini sangat tergantung pada kondisi iklim untuk keberhasilan produksi pertanian sebagai sumber pangan dan komoditas serta sumber air sebagai kebutuhan primer, yang disebabkan karena adanya kerentanan tinggikibat faktor geografis dan geofisika berupa daerah yang terpencil dan berbentuk kepulauan, dengan variabilitas iklim alami yang tinggi: dimana kekeringan berkepanjangan menjadi tantangan utama. Selain itu, lambatnya kemajuan pembangunan di wilayah ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kapasitas institusi-institusi otonomi yang memangku tanggung jawab dan kepentingan di NTT, dalam pemetaan kondisi jangka pendek dan jangka panjang, pendekatan yang reaktif dan aplikatif terhadap masalah,serta dalam pemanfaatan teknologi dan infrastruktur informasi dan komunikasi.

Tantangan pemerintahan yang bersifat desentralisasi seperti di NTT ini menyebabkan pula kurangnya ketersediaan pelayanan dasar publik seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) untuk NTT sebesar 62.67<sup>10</sup> yang masih tertinggal di belakang IPM nasional Indonesia sebesar 69,55 per tahun 2015.<sup>11</sup>

Mata pencaharian masyarakat di NTT yang sangat bergantung pada sektor pertanian yakni sebesar 80 persen pun menghadapi kenyataan bahwa pendapatan masyarakat di wilayah pedesaan sekitar 6 (enam) kali lebih rendah dari pendapatan masyarakat di wilayah perkotaan, dikarenakan masyarakat di wilayah pedesaan sangat tergantung pada kondisi iklim dalam proses produksi pertanian mereka, dimana ancaman ketahanan pangan dan ketersediaan air menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Ketidakstabilan kondisi iklim dan masih rendahnya kapasitas kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memberdayakan maupun memperluas kapasitas dan produktivitas lahan tani sebagai ladang sumber penghasilan utama dari produk-produk agrikultur yang dihasilkan pada musim panen karena terhambat oleh kondisi kekeringan yang ekstrem pun juga menjadi permasalahan tersendiri.

Selain itu, lambatnya kemajuan pembangunan di wilayah tersebut diakibatkan oleh karena perencanaan yang hanya bersifat berjangka pendek, pendekatan yang reaktif yang ditunjukkan masyarakatnya dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah, keterbatasan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan infrastruktur

---

<sup>10</sup> “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2010-2015,” *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur*, diakses melalui <http://ntt.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/69> pada 6 Maret 2017

<sup>11</sup> “Indeks Pembangunan Manusia 2015,” *Badan Pusat Statistik*, diakses melalui <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1278> pada 7 Maret 2017

komunikasi. Disamping itu, NTT mengalami tantangan dari segi lembaga pemerintahan daerahnya yang bersifat desentralisasi dengan ketidakefektifan koordinasi antar bidang serta kurangnya pengembangan kapasitas masyarakat dan produktivitas kerja yang dilaksanakan di tingkat subnasional.

Proyek SPARC, yang dipimpin oleh UNDP, dengan dukungan dari Global Environment Facility (GEF), dan Special Climate Change Fund (SCCF), berfokus pada penguatan dan pengembangan ketahanan iklim bagi sektor lembaga dan masyarakat pedesaan pada sumber-sumber mata pencaharian, pangan, dan ketersediaan air. Dalam kemitraan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tingkat nasional dan regional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTT, proyek SPARC diharapkan untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan nasional tentang adaptasi terhadap perubahan iklim. Mengambil 3 (tiga) kabupaten sebagai wilayah proyek pilot, yakni di Sumba Timur, Manggarai, dan Sabu Raijua, SPARC akan dilaksanakan pada akhir tahun 2012 sampai akhir tahun 2016.

Proyek ini akan menerapkan pendekatan holistik untuk meningkatkan produktivitas dalam mengupayakan sumber mata pencaharian di wilayah pedesaan dan ketahanan pangan dengan memperkuat ketahanan iklim, yang akan merumuskan pula kebijakan di tataran institusional pemerintah daerah hingga ke penerapan praktis di lapangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya, yakni pemerintah pusat Indonesia sebagai mitra donor, pemerintah daerah NTT sebagai mitra yang memiliki legitimasi untuk membantu kelancaran proyek, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat di NTT itu sendiri.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Penulisan ini dibatasi dengan melihat bagaimana peran UNDP sebagai aktor organisasi internasional mengimplementasikan Proyek SPARC dapat mempengaruhi masyarakat NTT dalam peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, air dan mata pencaharian sebagai bentuk pembangunan ekonomi masyarakat dalam periode antara tahun 2013 – 2016.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti, serta kehadiran proyek SPARC itu sendiri yang memunculkan pertanyaan penelitian yang relevan untuk diteliti, maka penulis merumuskan *“Bagaimana Peran UNDP Melalui Proyek Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities (SPARC) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Periode 2013 - 2016?”*

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan bagaimana peran UNDP sebagai organisasi internasional melalui Proyek SPARC dalam memperkuat ketahanan pangan, air, dan mata pencaharian sebagai bentuk pembangunan ekonomi di Provinsi NTT pada periode 2013-2016. Selain itu, tujuan dari

penulisan laporan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan penulis dalam menempuh studi Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangsih dalam pengembangan studi Hubungan Internasional, terutama yang terkait dengan kajian ekonomi politik pembangunan, ekonomi politik sumber daya, serta peran organisasi internasional dalam hubungannya dengan negara. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk diteliti lebih lanjut dengan analisis yang lebih mendalam dan matang. Terakhir, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat melalui *sharing knowledge* di dalam kajian tentang ilmu Hubungan Internasional.

## **1.4 Kajian Literatur**

Pembangunan yang berkelanjutan di suatu negara pada praktiknya tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi nasional semata, tetapi dibutuhkan pula adanya pengembangan kapasitas manusia di dalamnya. Pada tahap awal dalam upaya pembangunan misalnya, sebuah negara seharusnya dapat mampu mendahulukan kepentingan untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidikan dasar serta pelayanan kesehatan yang lebih baik, baru kemudian peran riset ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi semakin dapat ditingkatkan demi meraih

produktivitas keekonomian negara: karena kebijakan ekonomi serta sosial harus selalu saling berdampingan, dengan melibatkan aktivitas Proyek dan proyek pembangunan yang dapat melaksanakan praktik-praktik terbaik dalam mengedukasi dan meningkatkan kemampuan masyarakatnya (Gustav Ranis, Frances Stewart, dan Alejandro Ramirez, 2000).<sup>12</sup>

Bagaimana negara mampu mengelola sumber daya alam serta keuntungan-keuntungan geografis setiap wilayah di dalamnya untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan menjadi salah satu dimensi yang patut menjadi agenda pemerintah negara sebagai aktor kunci pembangunan itu sendiri, untuk kemudian dapat menentukan mitra kerja dalam mendukung pengembangan manajemen air serta ketahanan terhadap kondisi iklim yang ekstrem seperti kekeringan yang justru dapat menjadi nilai keekonomian tersendiri (Budi, Erni, Kharmila, Istiqlal).<sup>13</sup>

Terdapat konsepsi mengenai '*climate compatible development*' yaitu memadukan agenda adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi ke dalam Proyek atau proyek pembangunan, terutama di wilayah Afrika serta beberapa negara berkembang di dunia memiliki sisi kesempatan dan tantangan karena memunculkan pertanyaan apakah pembangunan yang berkelanjutan akan terwujud, ketika informalitas, politik diskriminatif, serta ketidakberdayaan politik

---

<sup>12</sup> Gustav Ranis, Frances Stewart, dan Alejandro Ramirez, "Economic Growth and Human Development," *World Development* Vol. 28, No. 2, pp. 197-219, 2000, Elsevier Science Ltd., diakses melalui <http://www.econ.yale.edu/~granis/papers/cp0546.pdf> pada 28 Maret 2017

<sup>13</sup> Budi Kartiwa, Erni Susanti, Kharmila Sari, dan Istiqlal Amien, "Manajemen Air Antisipatif dan Adaptif Perubahan Iklim untuk Mendukung Ketahanan Pangan," Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, diakses melalui <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/kemandirian-pangan-indonesia/BAB-VI-3.pdf> pada 28 Maret 2017

itu sendiri masih kental di dalam struktur sosial dan pemerintahan masyarakatnya (Anna, Camaren, 2014).<sup>14</sup>

Namun demikian, gambaran mengenai pengembangan kapasitas masyarakat di suatu daerah terutama dalam isu ketahanan pangan, lingkungan, serta peningkatan produktivitas ekonomi, secara khusus dipusatkan pada peran UNDP dalam proyek SPARC di NTT yang akan seperti apa, bagaimana, dan implementasinya akan dijabarkan pada sub-sub bab selanjutnya dalam penelitian ini.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Struktur landasan pemikiran yang komprehensif dalam penelitian ini akan dilandaskan berdasarkan cara berpikir ilmiah dan logis melalui aplikasi teori, konsep, atau pendapat para ahli untuk kemudian disusun sebagai argumentasi yang mampu menjawab pertanyaan penelitian secara konseptual. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan memiliki relevansi dengan masalah yang diangkat oleh penulis, dan secara khusus akan disesuaikan dengan teori dan konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional.

Kemunculan aktor-aktor yang tidak lagi semata hanya negara di dalam konstelasi hubungan internasional namun juga aktor-aktor non negara yang saling

---

<sup>14</sup> Anna Taylor dan Camaren Peter, "Strengthening Climate Resilience In African Cities A Framework For Working With Informality," *African Centre for Cities Climate and Development Knowledge Network Netherlands*, diakses melalui [https://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/05/CDKN\\_ACC\\_WP\\_final\\_web-res.pdf](https://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/05/CDKN_ACC_WP_final_web-res.pdf) pada 28 Maret 2017

berinteraksi melewati batas-batas yuridiksi negara dalam memenuhi kepentingan, fenomena, serta isu yang semakin kompleks dapat dikaji menggunakan landasan teori *Pluralisme*.

Pluralismememperkuat alasan bahwa aktor-aktor non-negara pun memiliki peran yang penting dalam dinamika hubungan internasional yang mencakup ketergantungan di dalam aspek-aspek seperti politik, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya yang semakin membuat seakan-akan menghilangnya batas-batas negara.<sup>15</sup>

Terdapat 4 (empat) proposisi dasar dalam Pluralisme.<sup>16</sup> Yang pertama bahwa aktor non-negara merupakan entitas yang penting dan berpengaruh dalam konstelasi politik internasional. Yang kedua adalah bahwa negara bukanlah sebagai aktor tunggal, tetapi di dalamnya terdiri dari individu-individu manusia, kelompok-kelompok kepentingan, serta pihak lain yang turut berperan dalam menentukan arah dan kebijakan negara dalam memenuhi segenap kepentingan nasional. Yang ketiga adalah bahwa negara adakalanya tidak mampu mengambil keputusan secara rasional, karena negara harus mampu mencakup seluruh kepentingan bersama yang diharapkan entitas aktor-aktor di dalamnya. Yang keempat adalah bahwa agenda politik internasional tidak lagi terbatas pada kepentingan nasional yang bersifat tradisional seperti perebutan kekuasaan atau penguatan pertahanan dan keamanan semata, tetapi kini juga menysar ke aspek-

---

<sup>15</sup> Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity* (New Jersey: Prentice Hall, 1997), hlm. 16-17

<sup>16</sup> Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond* (New York: Allyn & Bacon, 1999), hlm. 56

aspek yang semakin kompleks dan dirasa begitu dekat dengan kehidupan masyarakat sebagai unsur pembentuk negara, seperti ekonomi, sosial, hingga lingkungan.<sup>17</sup>

Secara keseluruhan, *Pluralisme* ingin menggambarkan bahwa terdapat perubahan-perubahan dalam konstelasi politik global, dimana aktor dalam Ilmu Hubungan Internasional tidak lagi hanya negara sebagai *unitary actor* dalam mengonsepsi kepentingan nasional seperti apa yang akan dikejar beserta implementasi-implementasi kebijakan luar dan dalam negerinya, tetapi kini terdapat pengakuan terhadap adanya kekuatan-kekuatan lain sebagai entitas non-negara, seperti perusahaan multinasional, lembaga internasional dan lembaga non-pemerintah, kelompok masyarakat *think-tank*, bahkan individu— aktor-aktor ini dibutuhkan karena untuk menganalisis negara bisa jadi terlalu luas cakupannya dalam menyelesaikan isu-isu yang dianggap kecil; atau justru menganalisis negara bisa jadi terlalu sempit cakupannya dalam menyelesaikan isu-isu yang dianggap besar.<sup>18</sup>

Pengakuan terhadap kenyataan bahwa munculnya aktor-aktor non negara dengan segala perluasan kompleksitas isu yang diperjuangkan untuk diraih di dalam hubungan antar aktor tersebut dapat dimaksud salah satunya adalah kemunculan organisasi internasional dan permasalahan sosio-ekonomi yakni pembangunan yang dalam konteks penelitian penulis, UNDP merupakan entitas

---

<sup>17</sup>Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *Op.Cit.* hlm. 199-200

<sup>18</sup> Paul R. Viotti dan Mark N. Kauppi, *International Relations and World Politics: Security, Economy and Identity* (New Jersey: Prentice-Hall, 1997), dikutip oleh Bob S. Hadiwinata, "Transformasi Isu dan Aktor dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme," dalam YP Hermawan (ed.), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 16-17

aktor yang dimaksud oleh *Pluralisme* tersebut sebagai organisasi internasional yang memiliki *power* dan legitimasi dalam melaksanakan kerja sama proyek pembangunan sebagai salah satu aktivitas dalam menjalin hubungan internasional.

*Organisasi Internasional* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah entitas institusi yang bersifat formal dengan struktur yang berkesinambungan yang berlandaskan mufakat antara anggota yang tergabung ke dalamnya—terdiri dari setidaknya 2 (dua) atau lebih utusan pemerintahan negara berdaulat atau non-pemerintahan, dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama, menurut Clive Archer.<sup>19</sup> Terdapat beberapa klasifikasi atas organisasi internasional itu sendiri, yakni berdasarkan sifat keanggotaannya; berdasarkan peran yang dijalankan; serta berdasarkan fungsi yang dijalankan.

Berdasarkan sifat keanggotaannya, Archer membagi organisasi internasional ke dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu *International Governmental Organizations* (IGOs) sebagai organisasi yang dibentuk dan dijalankan oleh para utusan pemerintahan negara-negara berdaulat untuk mencapai visi, misi, serta tujuan yang sama,<sup>20</sup> serta *International Non-Governmental Organizations* (INGOs) sebagai organisasi yang dibentuk dan dijalankan oleh para aktor-aktor non utusan pemerintahan negara berdaulat yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama untuk diraih.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Clive Archer, *International Organizations* 3rd Ed. (London: Routledge, 2003), hlm. 35

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39

Berdasarkan peran yang dijalankan, Archer berupaya menganalisis bagaimana organisasi internasional mampu menempatkan diri mereka di dalam ‘pasar politik global’ dimana hubungan antara individu, bisnis, bangsa, negara dan aliansi-aliansi dalam percaturan politik internasional; atau justru mereka hanya menjadi instrumen belaka aktor-aktor lain, yang dapat disalahgunakan sebagai instrumen bagi pihak-pihak tertentu dalam meraih kepentingan pribadi—terlebih dari itu, peran yang dimainkan ini pun akan menjadi landasan bagi terciptanya fungsi-fungsi dari organisasi internasional itu sendiri. Terdapat 3 (tiga) peran utama yang diklasifikasikan Archer, yaitu organisasi internasional sebagai *instrumen*: bahwa organisasi internasional berperan sebagai alat yang mampu membawa segenap tindakan untuk memenuhi tujuan atau kepentingan para anggotanya; sebagai *arena*: bahwa organisasi internasional berperan sebagai wadah yang memfasilitasi bertemunya para anggota dalam berdiskusi, berargumentasi, berkoorporasi, atau bahkan berselisih; dan sebagai *aktor independen*: bahwa organisasi internasional dapat bertindak dalam ranah internasional tanpa secara signifikan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan atau kepentingan-kepentingan politik negara-negara berdaulat manapun.<sup>22</sup>

Berdasarkan klasifikasi selanjutnya, Archer berupaya menggambarkan bagaimana peran-peran yang diemban tersebut dapat mempengaruhi sistem internasional melalui implementasi terhadap fungsi-fungsi yang dijalankan oleh organisasi internasional, yang diantaranya adalah fungsi *artikulasi dan agregasi*—dimana artikulasi yang dimaksud adalah bagaimana organisasi

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 68-79

internasional menyuarakan visi misi tujuan dan isu yang diangkat agar lebih dikenal oleh masyarakat serta agregasi yang dimaksud adalah proses untuk mengumpulkan lalu menyatukan ide, pendapat, dan kepentingan menjadi suatu kesatuan, fungsi *mempromosikan norma-norma dalam sistem internasional*, fungsi *rekrutmen*—untuk merekrut anggota atau partisipan ke dalam sistem politik internasional dalam naungan organisasi baik aktor non-negara maupun masyarakat secara berkelompok ataupun individual, fungsi *sosialisasi*—yaitu adanya penanaman loyalitas individu terhadap norma dan sistem yang berlaku dimana ia tinggal untuk dipatuhi dan dijalankan , fungsi *pembuat peraturan*, fungsi *pelaksana peraturan*, fungsi *pengesah peraturan*, fungsi *informasi*—dimana organisasi internasional berguna untuk mengumpulkan, mengolah, untuk kemudian menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mitra-mitra kerja sama program atau proyek yang dijalankan, serta fungsi *operasi*—sebagai fungsi utama yang harus dijalankan organisasi internasional yaitu untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan melalui kegiatan-kegiatan operasional, mulai dari pemberian bantuan dana hibah, hingga bantuan praktis seperti pelatihan, lokakarya, kursus keterampilan, serta pendampingan kepada target-target pemanfaat.<sup>23</sup>

Berdasarkan aktor organisasi internasional yang diangkat penulis dalam penelitian ini yaitu UNDP sebagai organisasi yang memiliki fokus pada pembangunan ekonomi dan manusia, maka diperlukan pula kerangka konseptual

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 94-107

mengenai pembangunan itu sendiri, sebagai tujuan akhir dari segenap bentuk implementasi proyek yang dijalankan UNDP melalui SPARC di NTT.

UNDP mengonsepsikan pembangunan sebagai pembangunan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya, dimana upaya melakukan pembangunan seyogianya dimulai dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia itu sendiri.<sup>24</sup> Adapun pembangunan yang dimaksud tidak semata mengenai pembangunan ekonomi yang terukur berdasarkan derajat-derajat keekonomian, tetapi secara komprehensif berbicara mengenai pencapaian kesetaraan, membongkar dinding-dinding marginal dalam masyarakat ke dalam golongan-golongan tertentu, pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab, peningkatan partisipasi individu-individu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingannya sebagai warga di sebuah negara,serta perluasan pilihan-pilihan individu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan yang layak<sup>25</sup>—dan kesemuanya itu didasarkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga dalam pemanfaatannya tidak hanya menguntungkan bagi masa sekarang tetapi juga bagi masa yang mendatang.<sup>26</sup>

Ekonom Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith pun turut memberikan argumentasi mengenai *Konsep Pembangunan*, dimana proses pembangunan tidak hanya tentang mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi, mempersempit

---

<sup>24</sup> Salbina Alkire, *Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts* (UNDP Human Development Reports Research Paper, 2010), hlm. 4-5

<sup>25</sup> United Nations Non-Governmental Liaison Service, *The NGLS Handbook* 3rd Edition (Geneva: NGLS, 2000), hlm. 150

<sup>26</sup> Timothy J. Fik, *The Geography of Economic Development: Regional, Changes, Global Challenges* 2nd Edition (Boston: Pearson Education Inc., 2012), hlm. 185

kesenjangan pendapatan, atau pengentasan kemiskinan dan pengangguran saja, tetapi dalam kerangka yang lebih luas, pembangunan harus dipandang sebagai proses yang bersifat multidimensional—mencakup adanya revolusi atas struktur sosial, sikap-sikap individu dalam bermasyarakat, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di sebuah negara.<sup>27</sup>

Meskipun demikian, perlu menjadi perhatian dalam penelitian ini bahwa berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, adapun masalah kemiskinan di NTT menjadi penghambat utama bagi proses pembangunan wilayah dan masyarakat di dalamnya, yang melandasi UNDP untuk terlibat melalui Proyek SPARC. Krusialnya masalah kemiskinan pun menjadikannya terdefinisi ke dalam banyak pemahaman dan konsep.

The World Bank mendefinisikan kemiskinan secara absolut, yang digambarkan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar minimum kehidupan dan kesejahteraan, dengan tolak ukur penghidupan kurang dari 1,90 Dolar Amerika Serikat (AS) per hari per individu.<sup>28</sup> Kesejahteraan sendiri didefinisikan lebih lanjut dan praktis oleh Amartya Sen sebagai bentuk kapabilitas individu untuk dapat berfungsi di dalam masyarakat, jadi kemiskinan terjadi ketika individu tidak memiliki kapabilitas untuk menerima pendapatan, akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta air dan sanitasi yang

---

<sup>27</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development* 11th Edition (Boston: Pearson Education Inc., 2012), hlm. 16

<sup>28</sup> World Bank, *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty* (Washington, DC: World Bank, 2000), dalam Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker, *Handbook on Poverty and Inequality* (Washington, DC: World Bank, 2009), hlm. 2

memadai, termasuk pula ketidakberdayaan untuk memiliki kebebasan berbicara, dan memiliki kerentanan terhadap kekerasan dan kejahatan, diskriminasi politik, serta marginalisasi. Konsepsi yang begitu kompleks dan meluas terhadap hajat hidup individu menjadikan kemiskinan menjadi permasalahan multidimensional yang membutuhkan peran serta aktor-aktor multidimensional pula selain pemerintahan sebuah negara dalam mengentaskannya.<sup>29</sup>

Adapun penyebab kemiskinan menurut The World Bank yang *pertama* adalah akibat kurangnya pendapatan dan aset masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, akses terhadap fasilitas kesehatan serta pendidikan. Penyebab *kedua* adalah akibat adanya rasa ketidakberdayaan dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Dan penyebab *ketiga* adalah akibat adanya kerentanan masyarakat terhadap guncangan dan ketidakmampuannya dalam menghadapi guncangan tersebut.<sup>30</sup>

Penggolongan masyarakat miskin pun dapat diidentifikasi menurut seorang profesor ekonomi ternama Paul Streeten berdasarkan kelas ekonomi dan sosialnya, tempat tinggalnya, rendahnya kualitas dan kapasitas modal manusia, etnisitasnya, wilayah yang memiliki kondisi vegetasi dan iklim lingkungan yang berbeda; juga perihal strategis atau terpencil nya suatu wilayah, tahapan umur anggota keluarga, kerentanan terhadap pekerjaan serta pasar modal karena diskriminasi ras atau jenis kelamin, isu gender sebagai hasil dari sistem patriarki,

---

<sup>29</sup> Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker, *Handbook on Poverty and Inequality* (Washington, DC: World Bank, 2009), hlm. 2

<sup>30</sup> World Bank, *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty* (2000), USA: Oxford University Press, hlm. 34

struktur dan status individu sebagai anggota dalam berumah tangga, kerentanan terhadap kondisi iklim, serta adanya keterbatasan secara fisik atau mental yang dialami individu.<sup>31</sup>

Paul Streeten pun memberikan alasan-alasan praktis mengapa kemiskinan harus dientaskan dan pembangunan manusia menjadi layak dan patut untuk diperjuangkan karena memiliki tujuan dan hasil akhir yang menjanjikan. Adapun yang *pertama* adalah bahwa upaya mengentaskan kemiskinan berarti mengupayakan pula adanya peningkatan produktivitas hidup manusia, dimana pemenuhan terhadap gizi, kesehatan, pendidikan, serta keterampilan sebagai tenaga kerja menjadi aset produktif yang terpenting di dalam ekonomi. Yang *kedua* adalah bahwa pengentasan kemiskinan dapat memperkecil ukuran keluarga yang diharapkan masyarakat sebagai salah satu strategi pembangunan manusia, disamping perbaikan dan peningkatan lama pendidikan khususnya bagi anak perempuan yang turut andil dalam proses pengecilan jumlah anggota keluarga. Yang *ketiga* adalah bahwa pengentasan kemiskinan dan perbaikan pembangunan manusia selaras dengan perbaikan kondisi fisik lingkungan dimana manusia tersebut tinggal, karena kelompok masyarakat miskin menjadi penyebab sekaligus korban utama dari adanya degradasi lingkungan. Faktor- faktor permasalahan kondisi lingkungan tersebut dapat disebabkan baik karena pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang semakin cepat, maupun karena kondisi vegetasi dan iklim di setiap wilayah yang berbeda-beda dengan derajat keberlanjutan sumber agrikultur yang berbeda-beda pula. Dan yang *keempat*, bahwa upaya pengentasan

---

<sup>31</sup> Paul Streeten, "Beyond the Six Veils: Conceptualizing and Measuring Poverty," *Journal of International Affairs* (1998): hlm 5

kemiskinan berkontribusi pula terhadap penciptaan masyarakat madani yang menjunjung dan menjalankan sistem demokrasi sebagai bentuk stabilitas sosial yang lebih baik, karena meskipun masyarakat miskin tidak berdaya untuk menjadi aktor sumber pemberontakan, namun adanya ketidaksetaraan secara ekonomi dapat menimbulkan konflik-konflik sosial yang dalam skenario terburuk dapat memungkinkan terjadinya perang sipil—setidaknya dalam kurun jangka panjang.<sup>32</sup>

Upaya pembangunan melalui pengembangan kapasitas masyarakat di dalamnya yang diusung oleh Proyek SPARC ini juga memiliki landasan kesesuaian dengan *Konsep Community Development* yang dirumuskan dalam Konferensi Pemerintahan Kolonial di Cambridge, Inggris pada tahun 1948, yang mengonsepsikan bahwasannya pembangunan masyarakat sejatinya merupakan upaya yang berorientasi kepada aktivitas-aktivitas peningkatan kesejahteraan sebuah entitas masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif serta inisiatif dari dalam masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari aktor pembangunan di wilayahnya,<sup>33</sup> yang dicirikan dengan adanya penciptaan perbaikan ekonomi dan sosial; penciptaan kondisi masyarakat yang mandiri, mumpuni, dan mampu bekerja dalam tim; serta pelibatan para ahli di bidangnya dengan penggunaan metode yang berasal dari dan untuk masyarakat.<sup>34</sup> Dengan demikian, maksud utama dari *community development* bahwa seyogianya menggambarkan upaya

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 2-3

<sup>33</sup> T.R. Batten, *Communities and Their Development : An Introductory Study with Special Reference to the Tropics* (Oxford: Oxford University Press, 1965), hlm. 1

<sup>34</sup> J. Midgley, et. al., *Community Participation: Social Development and the State* (London: Methuen, 1986), hlm. 18

membangun masyarakat melalui upaya meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan terhadap perbaikan taraf hidupnya.<sup>35</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *The Future of Power*, ilmuwan politik Joseph Nye berupaya mengonsepsi ulang mengenai kekuasaan (*power*) di dalam konstelasi politik global di abad ke-21 ini. Adapun *power* merupakan kemampuan negara sebagai aktor utama dalam mempengaruhi negara lain demi meraih kepentingan nasionalnya, dimana negara dapat menggunakan instrumen paksaan (*hard power*), pembayaran, atau melalui daya tarik dan bujukan (*soft power*). Yang menjadi sorotan utama Nye adalah bahwa dewasa ini, kemampuan untuk menggabungkan atau mengkombinasikan pilihan-pilihan instrumen *power* tersebut sebagai kekuatan cerdas akan menjadi salah satu tantangan utama bukan hanya untuk negara adidaya seperti Amerika Serikat semata, tetapi kini juga bagi aktor politik internasional lainnya. Konsekuensi dari terjadinya revolusi informasi dan globalisasi memunculkan dua pergeseran besar, mengenai bagaimana *power* diimplementasikan dalam politik internasional dan urusan-urusan dunia, dimana terjadi transisi kekuasaan antara negara-negara, serta difusi kekuasaan dari negara-negara menjadi aktor-aktor non-negara.<sup>36</sup>

Dalam konteks isu yang diangkat oleh penulis, maka secara khusus difusi kekuasaan menjadi kata kunci penting dalam menggambarkan adanya pergerakan *power* dari pemerintahan negara kepada aktor non-negara dan aktor non-

---

<sup>35</sup> Rhonda Philips dan Robert H. Pittman, *An Introduction to Community Development* (New York: Routledge, 2009), hlm. 7

<sup>36</sup> Joseph S. Nye, Jr. , "The Future of Power," *American Academy of Arts and Sciences Bulletin* Vol. LXIV no. 3 (Cambridge, MA: The American Academy of Arts and Sciences, 2011), hlm. 45, diakses melalui <https://www.amacad.org/publications/bulletin/spring2011/power.pdf> pada 13 November 2017

pemerintahan, dimana pertumbuhan peran, fungsi serta pengaruh yang diberikan aktor-aktor non negara tersebut bergerak semakin cepat dan tersebar luas, tak terlepas di belahan dunia Barat ataupun Timur.

Ketika negara meningkatkan kekuatan militer dan ekonominya sebagai bentuk *hard power*, maka negara tersebut memiliki daya untuk menggetarkan negara-negara lain, yang kemudian akan menimbulkan resiko bahwa negara-negara tersebut kemudian akan membentuk koalisi sebagai bentuk perlawanan. Namun apabila negara mampu menyeimbangkan *hard power* dengan *soft power* sebagai upaya membangun citra yang lebih atraktif dan bersahabat, maka negara tersebut akan mengurangi timbulnya resiko adanya pembentukan koalisi perlawanan dari negara-negara lain. Belum lagi dengan adanya tantangan maupun hambatan yang muncul dari lingkup terbawah dari hubungan transnasional, negara membutuhkan adanya kerjasama; dan disinilah *soft power* menjadi instrumen negara dalam menjawab tantangan maupun hambatan tersebut. Dengan segala kompleksitas isu-isu transnasional yang semakin meluas, maka penggunaan *smart power* dengan menyeimbangkan sisi keras dan sisi halus negara menjadi taktik terbaik bagi sebuah negara dalam menyikapinya, dimana kekuatan bersama aktor internasional lain menjadi sama pentingnya dengan kekuatan atas aktor internasional lainnya, menurut Nye.<sup>37</sup>

Oleh karena itu, tak hanya aktor di dalam konstelasi politik global yang mengalami kesinambungan, kepentingan dan konflik yang kini tengah diperjuangkan pun mengalami diversifikasi dalam konteks isu-isu yang tidak lagi

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 50

semata berotasi pada *hard power* yaitu pertahanan dan keamanan nasional yang cenderung mengangkat isu diplomasi serta militer-strategis,<sup>38</sup> tetapi muncul kehadiran *soft power* yaitu permasalahan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, dimana negara-negara berdaulat kini harus mampu menjamin adanya keamanan dan ketahanan ekonomi melalui pembukaan akses-akses terhadap sumber daya saham atau pasokan uang, materi, manusia, beserta aset-aset lainnya yang secara efektif harus mampu membawa nilai tambah keekonomian; adanya keamanan dan ketahanan sosial melalui proses interaksi interpersonal antar individu dalam masyarakat yang berkelanjutan dalam proses evolusi; serta adanya keamanan dan ketahanan lingkungan sebagai sistem pendukung bagi keberlangsungan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai entitas yang memegang peran sebagai aktor-aktorinternasional itu sendiri.<sup>39</sup>

Berdasarkan penelitian yang diangkat penulis, maka *Konsep Ketahanan Pangan* pun juga menjadi landasan bagi aktor-aktor yang terlibat dalam proyek SPARC dalam megupayakan terjadinya keamanan bahkan ketahanan terhadap ekonomi, sosial, serta lingkungan. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) merumuskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi yang menggambarkan terwujudnya setiap individu secara kapan saja dapat memiliki akses secara fisik, sosial dan ekonomi untuk ketersediaan makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan serta suplemen mereka dan

---

<sup>38</sup> Bob S. Hadiwinata, "Transformasi Isu dan Aktor dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme," dalam YP Hermawan (ed.), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 7

<sup>39</sup> Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc., 1998), hlm. 8

memiliki preferensi makanan yang mampu menunjang gaya hidup yang aktif dan sehat.<sup>40</sup> Dimana di dalamnya, terdapat 4 (empat) unsur utama yang melandasi terciptanya ketahanan pangan itu sendiri, yaitu *aksesibilitas*: parameter sejauh mana masyarakat mampu dengan mudah mengakses sumber-sumber daya pangan; *ketersediaan*: parameter apakah jumlah sumber daya pangan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; *pemanfaatan*: bagaimana sumber-sumber daya pangan tersebut dapat terdiversifikasi menjadi produk olahan turunan atau dapat menciptakan sumber mata pencaharian alternatif melalui kegiatan agrobisnis, misalnya; serta *stabilitas*: bagaimana sumber-sumber pangan tersebut dapat tersedia di dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi instabilitas perekonomian di suatu wilayah, atau juga dalam konteks variabilitas perubahan iklim dan kondisi geografis di suatu wilayah yang dapat beresiko terhadap ketersediaan sumber pangan itu sendiri.<sup>41</sup> Terwujudnya ketahanan pangan setiap individu merupakan hasil dari sinergi dari interaksi keempat unsur tersebut dari berbagai level.<sup>42</sup>

Terwujudnya ketahanan pangan tersebut tak lepas jadi terwujudnya pertumbuhan produktivitas pertanian, yang lebih jauh lagi memiliki keterkaitan dalam memacu proses pembangunan dan mereduksi kemiskinan di wilayah pedesaan. Adanya peningkatan produksi pertanian akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan bagi para petani yang kemudian meningkatkan pula daya

---

<sup>40</sup> "Trade Reforms and Food Security: Conceptualizing the Linkages," *FAO*, hlm. 28, diakses melalui <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4671e/y4671e00.pdf> pada 27 Maret 2017

<sup>41</sup> "The Food Security Learning Framework," *The M&E Harmonization Group of Food Security Partners*, hlm. 7, diakses melalui <https://www.ifad.org/documents/10180/b3a8f0f2-5c3f-42e5-8153-5457f352ac90> pada 27 Maret 2017

<sup>42</sup> Yayuk Farida Baliwati, Ali Khomsan, C. Meti Dwiriani, *Pengantar Pangan dan Gizi* Cetakan I (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004)

beli masyarakat di dalamnya.<sup>43</sup> Sektor pertanian merupakan instrumen penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan, terutama di negara-negara yang memiliki potensi pertanian yang besar, dengan memperhatikan kondisi variabilitas iklim dan kondisi geografis wilayahnya, maka kerangka kebijakan dan kerangka operasional dalam memanfaatkan potensi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan masyarakat di dalamnya dapat dikembangkan, demi mencapai ketahanan pangan, perluasan mata pencaharian dan peningkatan pendapatan.<sup>44</sup>

Oleh karenanya, *Konsep Adaptasi terhadap Perubahan Iklim* pun menjadi landasan berpikir bagi aktivitas penguatan terhadap ketahanan perubahan iklim, yang menjadi penting dan menjadi pilihan untuk diterapkan negara-negara berkembang khususnya sebagai strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan,<sup>45</sup> dengan pertimbangan bahwa dari segi pendapatan nasional dan lapangan kerja, masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang lebih rentan terhadap dampak negatif dari perubahan iklim, karena sumber mata pencahariannya sangat bergantung pada sektor pertanian, dengan keterbatasan

---

<sup>43</sup> C. Thirtle, et. al., "Relationship Between Changes In Agricultural Productivity and the Incidence of Poverty in Developing Countries," Report No. 7946 (London: Department for International Development, 2001) dalam Kate Schneider and Professor Mary Kay Gugerty, "Agricultural Productivity and Poverty Reduction: Linkages and Pathways," *The Evans School Review* 56 Vol. 1, Num. 1, Spring (2011): hlm. 59, diakses melalui <https://depts.washington.edu/esreview/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/ESR-2011-Research-Agricultural-Productivity-and-Poverty-Reduction.pdf>

<sup>44</sup> Bingxin Yu dan Lingzhi You, "A Typology of Food Security in Developing Countries," *China Agricultural Economic Review* Vol. 5 No. 1 (2013): 118-153, hlm. 138, <https://doi.org/10.1108/17561371311294810>

<sup>45</sup> K. Halsnæs dan S. Trærup, "Development and Climate Change: A Mainstreaming Approach for Assessing Economic, Social, and Environmental Impacts of Adaptation Measures," *Environmental Management* (2009), doi:10.1007/s00267-009-9273-0 dalam Ole Mertz, Kirsten Halsnæs, Jørgen E. Olesen, dan Kjeld Rasmussen, "Adaptation to Climate Change in Developing Countries," *Environmental Management* (2009): 43:743–752, hlm. 744, doi: 10.1007/s00267-008-925

kapasitas lembaga pemerintah serta teknologi yang mumpuni.<sup>46</sup> Konsep-konsep itu pulalah yang menjadi landasan terbentuknya dan terimplementasinya Proyek SPARC melalui kemitraan antar aktor negara dan non-negara demi mengentaskan kemiskinan dan kerentanan terhadap sumber daya pangan di NTT.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif, dimana penulis sebagai peneliti berfokus pada upaya menginterpretasi makna yang terdapat dalam obyek yang diteliti mengenai suatu masalah, dan bukan makna yang peneliti sampaikan pada penelitian ini atau yang diungkapkan oleh penulis dalam literatur yang ada.<sup>47</sup> Upaya tersebut pun diperlukan agar penulis memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti untuk mendapatkan preferensi yang lebih kaya sebagai landasan yang bersifat holistik, atau dengan kata lain adanya pengembangan kerangka gambaran yang lebih luas dan kompleks dengan pelibatan data dari berbagai perspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terlibat dalam situasi, dan umumnya membuat sketsa gambaran yang lebih besar yang muncul.<sup>48</sup> Sehingga dalam penelitian inipun, penulis lebih condong ke arah “mengapa” dan “bagaimana” untuk mendapatkan landasan pola

---

<sup>46</sup>Ole Mertz, Kirsten Halsnæs, Jørgen E. Olesen, dan Kjeld Rasmussen, loc. cit.

<sup>47</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* 4th Ed. (California: SAGE Publication, 2014), hlm. 234-235

<sup>48</sup>*Loc. Cit.*

dan karakteristik metode kualitatif tersebut,<sup>49</sup> agar dapat dihasilkan suatu gambaran serta pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai mengapa dan bagaimana peran UNDP dalam mengimplementasikan Proyek SPARC dalam memperkuat ketahanan pangan, air dan mata pencaharian sebagai bentuk pembangunan di Provinsi NTT pada periode 2013-2016.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Validitas adalah salah satu elemen kekuatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada penentuan apakah temuan akurat dari sudut pandang peneliti, aktor dalam objek yang diteliti, serta aktor atau pihak ketiga sebagai pembaca atau pemanfaat. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Metodologis Triangulasi. Teknik ini berfokus pada upaya mengumpulkan berbagai sumber data informasi, lalu memeriksa bukti-bukti dari sumber tersebut, untuk kemudian menggunakannya sebagai landasan justifikasi koheren tema penelitian yang diangkat. Tujuan dari teknik ini adalah karena apabila tema penelitian dibangun berdasarkan konvergensi beberapa sumber data atau perspektif dari para aktor lain, maka proses ini dapat diklaim sebagai tambahan validitas dalam penelitian.<sup>50</sup>

Adapun penulis menggunakan sumber data kualitatif, berupa dokumen publik seperti laman berita, wawancara, laporan resmi dari pemerintah Indonesia, laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan resmi dari United Nations

---

<sup>49</sup>Howard Lune dan Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* 9th Ed Global Ed. (Essex: Pearson Education Ltd., 2017), hlm. 12

<sup>50</sup>John W. Creswell, *Op.Cit.*, hlm. 251

Development Programme (UNDP), laporan resmi dari beragam organisasi-organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan, maupun dokumen pribadi seperti buku, jurnal ilmiah, dan e-mail, daripada mengandalkan satu sumber data. Sumber-sumber tersebut pun dikumpulkan, untuk kemudian diinterpretasi dan disusun menjadi sebuah karya ilmiah yang baik.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan yang terdiri dari 1 (satu) bab, pembahasan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) bab, dan kesimpulan yang dijabarkan dalam 1 (satu) bab.

Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan pengumpulan data, serta sistematika pembahasan yang terkandung dalam penelitian.

Bab II berisi tentang permasalahan kemiskinan dan aspek-aspek pembangunan ekonomi yang belum terimplementasi secara baik di NTT, beserta beserta penyebab-penyebabnya.

Bab III berisi tentang bagaimana profil, tujuan, peran, strategi, serta fokus UNDP dalam mengimplementasikan aktivitasnya sebagai organisasi donor pembangunan internasional di Indonesia.

Bab IV berisi tentang peran UNDP dalam mengimplementasikan Proyek SPARC dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di Provinsi NTT pada periode 2012 -2016. Akan dijelaskan mengenai latar belakang UNDP di NTT, serta pembahasan mendalam tentang Proyek SPARC yang diimplementasikan melalui praktik-praktik terbaik dalam membantu pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan kondisi iklim yang ekstrim di Provinsi NTT demi penguatan ketahanan pangan melalui produktivitas lahan serta pertumbuhan ekonomi bagi masyarakatnya.

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian ini. Pada bagian ini akan dielaborasi simpulan dari seluruh pokok bahasan yang telah diteliti pada bab-bab sebelumnya, serta temuan-temuan yang menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan peran yang dilakukan oleh UNDP dalam membantu pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan terhadap kondisi iklim yang ekstrim di NTT untuk memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan dan kegiatan ekonomi masyarakatnya dengan mencantumkan bagaimana hasil dari peran yang telah dilakukan oleh UNDP tersebut